

EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

Erna Haryanti Koestedjo

haryanti_erna@yahoo.com

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2015. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menyusun evaluasi program penanggulangan kemiskinan tahun 2015. Mendeskripsikan efektifitas dan hasil program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

Metode analisis kegiatan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Hasil Penelitian ini berupa Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan secara keseluruhan telah mencapai keberhasilan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan hingga tercapai sebesar 15,74 persen pada tahun 2014. Keberhasilan Grindulu Mapan ditunjukkan dengan menurunnya jumlah RTSM pada tahun 2011 sebesar 6.936 RT menjadi 2.092 RT. Terjadi penurunan jumlah RTSM sebanyak 69,84 %. Pelaksanaan program Grindulu Mapan sebagai inisiatif dan inovasi pemerintah daerah dinilai semakin baik dengan diperluasnya rumahtangga sasaran dari RTSM menjadi RTSM, RTM dan RTHM. Tujuan program Grindulu Mapan untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi dan pemenuhan layanan dasar telah tercapai. Sedangkan tujuan keberdayaan RT miskin masih harus ditingkatkan lagi. Dari analisis Nilai Tambah Ekonomi bantuan, program paling efektif adalah dengan memberikan bantuan modal usaha produktif, dengan pengawasan dan pengendalian yang baik. Partisipasi dan kontribusi pihak swasta (perusahaan) dan LSM masih rendah dan perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kemiskinan, Nilai Tambah, Ekonomi,.

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Kemiskinan merupakan permasalahan persisten dan multidimensi yang memerlukan upaya penanganan secara serius dan berkelanjutan. Secara umum, kondisi kemiskinan masyarakat ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan. Konsep kemiskinan memiliki lima dimensi, yaitu : 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat, 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah

kesejahteraan masyarakat, namun juga terkait dengan aspek lainnya seperti akses infrastruktur dasar dan peluang kerja.

Isu kemiskinan sebagai isu global telah melahirkan konsep MDG's (Millenium Development Goals). MDGs (Milenium Development Goal) adalah agenda untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan yang telah disepakati para pemimpin dunia pada Millennium Summit pada bulan September 2000. MDGs dapat juga dikatakan sebagai komitmen dunia dalam mengatasi kemiskinan global melalui berbagai dimensi (UNDP, 2010).

Di Indonesia, perhitungan jumlah penduduk miskin menggunakan pendekatan moneter. Artinya, pengukuran kemiskinan didekati dari sisi pendapatan/pengeluaran. Dalam prakteknya, BPS menghitung garis kemiskinan, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2013, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 292.251,- dan naik menjadi Rp 312.328,- per kapita perbulan, pada tahun 2014. Oleh karenanya, perkembangan angka kemiskinan, secara ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pacitan hingga saat ini juga masih menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan yang salah satunya dicirikan dengan prosentase penduduk miskin relatif cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan sebesar 16,66 persen. Angka ini masih di atas angka kemiskinan Propinsi Jawa Timur (12,55 persen) maupun Nasional (11,37 persen), pada tahun yang sama. Menurut Bupati Indartato, angka kemiskinan di Pacitan pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi sebesar 0,92 persen. Pada tahun 2014, angka kemiskinan turun menjadi 15,74 persen.

Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berupaya keras dengan mencanangkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan, maupun program-program yang pendanaannya *sharing* dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Salah satu inovasi Pemerintah Daerah adalah adanya program Grindulu Mapan yang merupakan Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan. Selain itu, dilaksanakan berbagai program pembangunan melalui SKPD/Badan dilingkungan Kabupaten Pacitan.

Berbagai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dapat disaksikan dan dinilai di wilayah pesisir ini. Dengan adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang berjalan selama ini di Kabupaten Pacitan, maka sudah waktunya untuk melakukan evaluasi dari berbagai program tersebut bagi rumah tangga miskin. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tugas TKPK Kabupaten sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menunjukkan hasilnya sesuai targetnya masing-masing. Namun demikian pelaksanaan program-program tersebut, baik yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Pacitan, masih harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sehingga dapat diketahui program apa saja yang memberikan dampak atau manfaat terbesar dalam menurunkan angka kemiskinan daerah. Adapun program penanggulangan kemiskinan nasional yang dapat dievaluasi antara lain : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas/BPJS, Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan PNPM Mandiri. Dari program daerah, antara lain : program Grindulu Mapan. Program ini telah berhasil memberikan bantuan sosial kepada kelompok paling miskin. Bantuan berupa beras.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Menyusun Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015.
2. Mendeskripsikan efektifitas dan hasil program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

Manfaat kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya Laporan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015.
2. Tersedianya informasi tentang strategi prioritas, peningkatan efektifitas dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang memerlukan upaya penanganan secara serius. Secara umum, kondisi kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan. Konsep kemiskinan memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat, 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat, namun juga terkait dengan aspek lainnya seperti akses infrastruktur dasar dan peluang kerja.

Menurut *World Bank Institute* (2005), ada 4 alasan mengapa kemiskinan diukur. Pertama adalah untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; jika kemiskinan tidak diukur, maka orang miskin akan mudah terlupakan. Kedua, orang harus mampu mengidentifikasi orang miskin jika salah satu tujuannya adalah untuk keperluan intervensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Ketiga adalah untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek atau kebijakan intervensi yang diarahkan kepada orang miskin. Dan terakhir adalah untuk mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan menggambarkan keadaan dimana individu atau rumah tangga berada dalam kondisi yang sangat kekurangan dalam kesejahteraannya. Perspektif

yang berbeda mengenai kesejahteraan dan pembangunan memberikan ruang yang berbeda dimana kemiskinan diamati dan diukur.

Ukuran Kemiskinan

Di Indonesia terdapat beberapa model penghitungan kemiskinan, yaitu Model Tingkat Konsumsi, Model Kesejahteraan Keluarga dan Model Pembangunan Manusia. Penjelasan masing-masing model sebagai berikut :

1) Model Tingkat Komsumsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyertakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan model konsumsi susenas (survey Sosial Ekonomi Nasional).

2) Model Kesejahteraan Keluarga.

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendekatan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu: Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dll.

Data Keluarga Berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, Data Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam katagori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III. Data kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus.

3) Model Pembangunan Manusia.

Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu: United Nation Development Program (UNDP). Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 negara. Laporan UNDP tahun 2004 yang menjelaskan keadaan pada tahun 1999 dan 2002. HDR berisikan penjelasan tentang empat index yaitu index Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Index Pembangunan Jender atau Gender Development Index (GDI), Langkah Pemberdayaan Jender atau Gender Empowerment Measure (GEM) dan Index Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI). HDI dengan indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek

huruf orang dewasa, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat daya beli perkapita. HPI, dengan indikator kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf orang dewasa, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan, dan persentase balita yang kurang makan. GDI, indikatornya adalah tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan, tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan. Sedangkan GEM indikatornya adalah persentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan perempuan, persentase jumlah pegawai tingkat senior, manajer, profesional dan posisi teknis dari laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan.

Ukuran kemiskinan dalam HPI lainnya mengukur *Poverty Gap Index* atau P_1 dan *Poverty Severity Index* atau P_2 . *Poverty Gap Index* atau P_1 atau indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Perkembangan angka indeks P_1 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan. Sedangkan *Poverty Severity Index* atau P_2 atau indeks keparahan kemiskinan ini adalah jumlah dari kuadrat selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Serupa dengan P_1 , Perkembangan angka indeks P_2 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka pengurangan penduduk miskin, pemerintah telah menelurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah dengan menciptakan skema perlindungan sosial. Perlindungan sosial berfungsi sebagai kerangka kerja kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan. Perlindungan sosial juga mencakup dan memperluas pendekatan alternatif untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Sebagai kerangka kerja kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan di negara berkembang, perlindungan sosial merupakan komponen kunci dari kebijakan pembangunan. Peran pembangunan yang lebih luas dari perlindungan sosial di negara berkembang mencakup 3 fungsi, yaitu:

- 1) membantu melindungi tingkat dasar dari konsumsi diantara masyarakat miskin dan masyarakat yang terancam jatuh ke dalam kemiskinan,
- 2) memfasilitasi investasi manusia dan aset produktif lainnya yang dapat memberikan jalan keluar dari kemiskinan yang menetap (*persistent*) dan kemiskinan antar generasi,
- 3) memperkuat mereka yang berada dalam kemiskinan sehingga mereka dapat mengatasi kesulitannya.

Dibedakan dua jenis tindakan umum dalam bidang perlindungan sosial, yaitu bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial meliputi segala bentuk tindakan publik (pemerintah dan non pemerintah) yang dirancang untuk mentransfer sumber daya untuk kelompok-kelompok yang dianggap memenuhi syarat karena kekurangan, atau kasus lain seperti veteran perang. Kekurangan dapat dilihat dari

Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Tahun 2015
(Erna Haryanti Koestedjo)

segi miskin pendapatan, atau status sosial atau gizi. Jaminan sosial adalah jaminan yang didanai dan didasarkan pada prinsip asuransi.

Sekilas Grindulu Mapan

Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Hal ini telah tercantum dalam visi Bupati Pacitan yang dituangkan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2011-2016, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”.

Grindulu Mapan (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan) merupakan kelanjutan program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD sebelumnya. Program ini telah diperluas dan diperkuat dengan mengikutsertakan berbagai pihak di luar pemerintahan agar beban pemerintah dapat dikurangi sehingga penanggulangan kemiskinan lebih cepat dapat diatasi.

Visi program Grindulu Mapan adalah terwujudnya kesejahteraan dan keberdayaan rumahtangga miskin serta kebanggaan masyarakat yang lebih mampu ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar, sedangkan keberdayaan berarti mampu memanfaatkan potensi, aset dan kemampuan sosial yang dimilikinya, mengakses dan mengelola sumberdaya yang ada untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Program Grindulu Mapan merupakan gerakan terpadu program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah dan pihak-pihak di luar pemerintah yang ditujukan untuk Rumahtangga Sangat Miskin (RTSM), Rumahtangga Miskin (RTM) dan Rumahtangga Hampir Miskin (RTHM). Prioritasnya adalah penanggulangan RTSM. Sasarannya adalah masyarakat miskin yang telah diidentifikasi oleh pemerintah daerah beserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan.

Tujuan program ini adalah : a) meningkatkan ketahanan sosial ekonomi seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan terutama masyarakat miskin; b) meningkatkan keberdayaan seluruh masyarakat Pacitan terutama masyarakat miskin sehingga mampu memobilisasi potensi sosial yang dimiliki, mampu menolong dirinya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri; c) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan.

Strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Grindulu Mapan adalah : a) menempatkan masyarakat miskin sebagai titik sentral pemberdayaan sehingga mampu mendorong keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya; b) sumber pendanaan program ini diperluas, selain dari pemerintah melalui APBN dan APBD, juga mengikutsertakan dukungan dari perusahaan dan berbagai unsur dalam masyarakat sendiri; c) meningkatkan ketahanan sosial ekonomi RTSM melalui bantuan sosial terpadu dan memberdayakan RTM dan RTHM melalui dukungan sosial ekonomi agar mandiri dan meningkat kesejahteraannya.

Selain bantuan sosial dan pemberdayaan tersebut, masyarakat miskin terus menerus di motivasi agar bangkit dan bergerak memberdayakan keluarganya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dirinya sendiri.

Ruang lingkup kegiatan program Grindulu Mapan meliputi : a) penyediaan data mikro yang menyediakan data rumahtangga miskin sesuai Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011, secara akurat menggunakan data by name by address dan by character; b) identifikasi kebutuhan masyarakat miskin dengan mengajak rumahtangga sasaran terlibat langsung dalam mengungkapkan aspirasi dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan ini disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi dan wilayah geografis dimana rumahtangga sasaran berada; c) fasilitasi bantuan kepada masyarakat miskin, yang dikategorikan dalam rumahtangga miskin yang produktif (masih bekerja) dan non produktif; d) peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis dan pelatihan, pengembangan teknologi, fasilitasi pemasaran dan sebagainya; e) pendampingan masyarakat miskin yang dilakukan oleh SKPD maupun lembaga sosial lainnya untuk memberikan empati, fasilitasi sehingga menumbuhkan optimisme dan keberdayaan rumahtangga sasaran.

METODOLOGI

Lokasi kegiatan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

KEADAAN UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN

Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki Komitmen yang tinggi untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dengan visi Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera sebagaimana program sebelumnya, yaitu : PUNADIRPA, GERBANG INTAN dan GERBANG EMAS. Untuk menjamin kesinambungan komitmen, maka Program Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan dan dijabarkan melalui Program GRINDULU MAPAN.

Perkembangan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan terus menurun dalam 6 tahun terakhir. Pada tahun 2008, angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan berada di angka 21,17 %. Dengan kata lain 1 dari 5 warga Kabupaten Pacitan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2013, penduduk miskin masih tercatat sebesar 16,66% atau sekitar 91,3 ribu jiwa.

Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin menurun lagi menjadi 15.74 %. Meskipun masih diatas rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur, pencapaian tersebut merupakan prestasi yang cukup baik bagi pemerintah Kabupaten Pacitan.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Pacitan lebih bersifat struktural daripada individual. Masyarakat Kabupaten Pacitan mengalami kemiskinan bukan karena malas bekerja, tetapi karena struktur sosial menghambat mereka dalam mengakses sumber-sumber pendapatan. Struktur sosial yang tidak berkeadilan tidak hanya melahirkan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Pacitan didasarkan pada :

- a. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Instruksi Presiden RI no. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Pembangunan Pro-Rakyat, Keadilan untuk Semuadan Pencapaian Tujuan Milenium.
- c. Keputusan Presiden No 10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 dan selanjutnya dijabarkan pada kebijakan Gubernur Jawa Timur, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pro-rakyat, pro-poor dan pro-job.
- e. Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 yang memuat 6 (enam) Prioritas Kabupaten Pacitan 2011-2016.
- f. Keputusan Bupati No. 13 tahun 2011 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan.
- g. Keputusan Bupati Pacitan No. 188.45/19.A/408.21/2012 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pacitan.
- h. Keputusan Bupati Pacitan nomor 188.45/239.A/KPTS/408.21/2012 Tentang Tim Teknis Penyusun dan Pelaksana Program ‘GRINDULU MAPAN’ Kabupaten Pacitan tahun 2012

Kabupaten Pacitan mempunyai dasar dalam menilai sebuah keluarga masuk dalam kategori miskin atau tidak, hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati No. 13 tahun 2011 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan. Berikut ini adalah indikator kemiskinan Kabupaten Pacitan :

Tabel 1
Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Pacitan

No	Aspek	Indikator Operasional
1	Penghasilan	Penghasilan kepala keluarga kurang dari Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan atau petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha. Tidak memiliki tabungan uang atau barang yang mudah dijual senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
2	Kesehatan	Tidak mampu membayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringan lainnya. Hanya mampu makan 1 (satu) atau 2 (dua) kali sehari. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/ikan laut 1 (satu) kali dalam seminggu. Sumber air minum dari sumur/mata air yang tidak terlindungi /sungai/air hujan. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) atau bergabung dengan tetangga.

No	Aspek	Indikator Operasional
3	Pendidikan	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
4	Ekonomi	Satu tahun hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru per jiwa Bahan bakar untuk memasak sehari hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
5	Perumahan	Luas lantai rumah/bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per anggota keluarga Lantai rumah/bangunan tempat tinggal dari tanah Dinding rumah/bangunan tempat tinggal dari bamboo/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester Penerangan rumah tidak menggunakan listrik

Sumber : Pedoman Umum Grindulu Mapan Tahun 2013

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan pendataan rumah tangga miskin oleh pemerintah daerah sehingga diperoleh sebanyak 6.936 RTSM yang memenuhi 13-14 indikator. RTSM tersebut tersebar di 12 kecamatan, 171 desa/kelurahan. Pada tahun 2008, rumahtangga miskin yang tercatat PPLS sebanyak 44.059 rumah tangga. Dalam kenyataannya, banyak rumah tangga miskin yang belum terdata oleh pemerintah pusat, yaitu sebanyak 6.936 rumahtangga. Berdasarkan pendataan PPLS 2008, rumah tangga sangat miskin yang terbanyak dijumpai di 3 Kecamatan yaitu Tulakan, Tegalombo dan Bandar.

Struktur organisasi program Grindulu Mapan disusun berdasarkan keputusan Bupati Pacitan pada tahun 2011. Penanggungjawab program Grindulu Mapan adalah Bupati selaku kepala daerah, dengan ketua umum program adalah Wakil Bupati. Tugas kesekretariatan program ini diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang melakukan koordinasi dengan semua SKPD yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan. Bagian paling bawah dalam organisasi ini pada awalnya adalah RTSM (Rumahtangga Sangat Miskin). Pada tahun 2013, bagian sasaran tersebut diubah menjadi lebih luas meliputi RTSM, RTM dan RTHM.

Kegiatan dan Hasil Program Grindulu mapan

Kegiatan dan hasil yang dicapai program Grindulu Mapan berdasarkan laporan tahun 2013, sebagai berikut :

1. Bantuan Perabot Rumah Tangga

Sumber anggaran berasal dari anggaran BOP : Rp 18.500.000,- dan anggaran BLM : Rp 256.500.000,-. Bantuan diberikan untuk 7 kecamatan, dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.

Realisasi Bantuan Perabot Rumahtangga Grindulu Mapan, 2013

No.	Lokasi Penerima		Jumlah RTSM	Jenis Perabot
	Kecamatan	Desa		
1.	Punung : (7) desa	Sooka, Mendolo Kidul, Mendolo Lor, Tinatar, Punung, Mantren, Ploso	51 RTSM	Perabot tidur

Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Tahun 2015
(Erna Haryanti Koestedjo)

No.	Lokasi Penerima		Jumlah RTSM	Jenis Perabot
	Kecamatan	Desa		
2.	Pringkuku (1)	Pelem	17 RTSM	Perabot rumah tangga
3.	Pacitan (2)	Ploso, Sambong	3 RTSM	Perabot dapur
4.	Kebonagung (1)	Gembuk	6 RTSM	Perabot rumah tangga
5.	Tulakan (1)	Ketro	6 RTSM	Perabot rumah tangga
6.	Ngadirojo (2)	Pagerejo, Wonoasri	9 RTSM	Perabot dapur dan rumah tangga
7.	Sudimoro (6)	Ketanggung, Gunungrejo, Pager Lor, Sudimoro, Gunungrejo, Ketanggung.	40 RTSM	Perabot tidur
Jumlah	7	20	132	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013

2. Bantuan Ternak

Sumber anggaran sebesar Rp 264.000.000,- diwujudkan menjadi 172 ekor kambing, 1 ekor domba dan 3 paket ternak ayam. Setiap RTSM atau RTM mendapatkan satu ekor kambing. Bantuan diberikan untuk 25 desa di 3 kecamatan, dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.
Realisasi Bantuan Ternak Grindulu Mapan, 2013

No.	Lokasi Penerima		Jumlah dan Jenis Bantuan
	Kecamatan	Desa	
1.	Donorojo : (7) desa	Donorojo, Gedompol, Widoro, Gendaran, Kalak, Sekar, Sukodono	45 ekor kambing
2.	Punung : (11) desa	Kebonsari, Tinatar, Mendolo Kidul, Kendal, Mendolo Lor, Wareng, Gondosari, Ploso, Mantren	35 ekor kambing 1 ekor domba 3 paket ternak ayam
3.	Pringkuku : (7) desa	Candi, Poko, Glinggangan, Jlubang, Sobo, Sugihwaras, Tamanasri	92 ekor kambing
Jumlah	3	25	176 RTSM

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013

3. Bantuan Modal Usaha

Sumber anggaran sebesar Rp 117.000.000,- diberikan kepada 117 RTSM kategori produktif di 12 Kecamatan. Datanya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.
Realisasi Bantuan Modal Usaha Grindulu Mapan, 2013

No.	Lokasi Penerima		Jumlah Bantuan (Rp)
	Kecamatan	Jumlah RTSM Produktif	
1.	Donorojo	7 RTSM	Rp 7.000.000,-
2.	Punung	1 RTSM	Rp 1.000.000,-
3.	Pringkuku	5 RTSM	Rp 5.000.000,-
4.	Pacitan	17 RTSM	Rp 17.000.000,-
5.	Kebonagung	7 RTSM	Rp 7.000.000,-
6.	Arjosari	13 RTSM	Rp 13.000.000,-
7.	Nawangan	5 RTSM	Rp 5.000.000,-
8.	Bandar	6 RTSM	Rp 6.000.000,-
9.	Tegalombo	8 RTSM	Rp 8.000.000,-
10.	Tulakan	40 RTSM	Rp 40.000.000,-
11.	Ngadirojo	8 RTSM	Rp 8.000.000,-
12.	Sudimoro	-	-
Jumlah	3	117 RTSM	Rp 117.000.000,-

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013

Bantuan modal usaha diberikan kepada RTSM produktif pada bulan Juli 2013 oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Setiap RTSM menerima bantuan hibah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak perlu dikembalikan. Modal usaha ini dimaksudkan sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah ada dan berjalan dengan baik.

4. Bantuan Peralatan Usaha

Anggaran 2012 : Rp 240.000.000,- Anggaran 2013 : Rp 56.500.000,-. Jumlah penerima 37 RTSM, tetapi lokasi penerima bantuan tidak disebutkan. Bantuan peralatan usaha diberikan kepada RTSM yang memiliki usaha produktif berupa usaha jasa dan non perdagangan seperti tukang kayu, penjahit, bengkel motor, pembuat kue, produsen tempe, selep tepung, tambal ban, tukang cukur dan sebagainya. Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk dan produktifitas kerja sehingga memuaskan bagi konsumen. Diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Selain mendapatkan bantuan teknis dalam pemanfaatan bantuan, RTSM juga akan dipantau perkembangannya dalam memanfaatkan bantuan peralatan tersebut.

5. Bantuan Perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Bantuan perbaikan RTLH milik masyarakat miskin tetap bersandar pada kaidah kreatifitas dan partisipasi masyarakat. Bantuan tidak didasarkan pada ukuran rumah yang harus direhabilitasi dan tidak menetapkan desain atau konstruksi rumah. Pemerintah menyadari bahwa RTSM dan masyarakat di sekitarnya diberikan kesempatan untuk membangun rumahnya sendiri. Sehingga bantuan bahan non lokal yang diberikan oleh Grindulu Mapan hanya merupakan subsidi yang bersifat melengkapi. Tujuannya agar RTSM lebih produktif dan mandiri. Jenis kegiatan bantuan perbaikan RTLH meliputi :

rehab rumah, plesterisasi, pembuatan jamban atau WC tertutup, pembuatan sumur dan bantuan pompa air. Realisasi bantuan perbaikan RTLH pada tahun 2012 dan 2013, datanya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.
Realisasi Bantuan Perbaikan RLTH Grindulu Mapan, 2012 dan 2013

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sasaran	Tahun 2012		Tahun 2013		Jumlah Sasaran Belum Dibantu
			Jumlah	Anggaran	Jumlah	Anggaran	
1.	Rehab Rumah	2.361	259	1.590.255.700	695	4.169.755.700	1.666
2.	Plesterisasi	1.035	219	1.017.493.900	282	1.357.993.900	753
3.	Jamban/wc	76	3	22.500.000	11	59.500.000	65
4.	Sumur	1	1	5.455.000	1	5.455.000	-
5.	Pompa air	1	-	-	-	-	1

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013

Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) ini adalah program penanggulangan kemiskinan yang paling besar anggaran dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan. Realisasinya sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, sebanyak 11.989 rumah telah dibantu atau direhab. Masih tersisa sebanyak 3.879 rumah yang belum mendapatkan bantuan perbaikan ini, dan membutuhkan dana sebesar Rp 38.790.000.000,- dengan asumsi setiap RTLH mendapatkan bantuan sebesar Rp 10.000.000,-.

6. Bantuan Biaya Pendidikan

Bantuan biaya pendidikan dari program Grindulu Mapan hanya diberikan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/SMK/MA yang orang tuanya termasuk dalam data base RTSM Grindulu Mapan. Siswa SD/MI sudah mendapatkan bantuan dari program bantuan pendidikan dari APBN dan APBD Povinsi Jawa Timur. Artinya para pelajar tersebut belum nemdapatkan beasiswa siswa miskin (BSM) dari pemerintah pusat atau APBN. Mekanismenya dengan memberikan fasilitas Kartu Pacitan Pintar (KPP). Pembiayaan dari KPP ini dapat digunakan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Data realisasi bantuan pendidikan tersebut dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Bantuan Pendidikan Grindulu Mapan, 2013

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	Anggaran	Keterangan
1.	SD / MI	743	Rp 334.350.000,-	@450.000/APBN
2.	SMP / MTs	120	Rp 90.000.000,-	@750.000/APBN
		84	Rp 46.200.000,-	@550.000/APBD
3.	SMA/SMK/MA	58	Rp 45.240.000,-	@780.000/APBD
4.	Biaya Operasional	-	Rp 75.000.000,-	APBD
Jumlah		25	Rp 590.790.000,-	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013

7. Bantuan Biaya Kesehatan

Bantuan biaya kesehatan dari program Grindulu Mapan bernama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pacitan (JPKP). Bantuan ini diberikan kepada seluruh RTSM terutama yang belum dijamin kesehatannya oleh pembiayaan dari Jamkesmas dan Jamkesda. Pada tahun 2013, program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pacitan telah menerbitkan Kartu Pacitan Sehat.

Bantuan biaya kesehatan terbesar digunakan untuk belanja langsung RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Pacitan, yaitu sebesar Rp 2,5 Milyar. Dana bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin secara keseluruhan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2013 sebesar Rp 3.935.000.000,-.

Tabel 7.
Realisasi Bantuan Kesehatan Grindulu Mapan, 2013

No.	SKPD	Jumlah RTSM	Anggaran	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	6.936	Rp 700.000.000,-	Belanja Langsung
			Rp 735.000.000,-	Bansos APBD
2.	RSUD	6.936	Rp 2.500.000.000,-	Belanja Langsung
Jumlah		6.936	Rp 3.935.000.000,-	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan, 2013

8. Bantuan Pangan (Raskinda)

Bantuan pangan adalah kegiatan pemberian subsidi pangan berupa beras 15 kg perbulan untuk rumahtangga miskin. Bantuan ini telah dilaksanakan mulai tahun 2012. Bantuan raskinda diberikan kepada rumahtangga miskin yang tidak menerima bantuan raskin dari pemerintah pusat. Bantuan ini diprioritaskan kepada rumahtangga miskin yang non produktif. Bantuan raskinda diberikan kepada rumahtangga miskin secara gratis, atau disubsidi 100 %.

Pada tahun 2012, raskinda menerima 15 kg beras perbulan selama setahun. Pada tahun 2013, bantuan pangan tidak dalam bentuk beras, tetapi diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 101.250,- perbulan. Dalam prakteknya, uang yang diterimakan sebesar Rp 105.000,- perbulan. Alasan penggantian jenis bantuan tersebut karena proses pengadaan beras dan pendistribusian yang lama. Selain itu, bantuan pangan yang dalam bentuk uang bisa dimanfaatkan menurut kebutuhan keluarga masing-masing. Realisasi bantuan beras selama bulan Juni-Desember 2013 mencapai Rp 1.875.453.750,- yang diberikan kepada 2.923 rumahtangga sasaran.

KESIMPULAN

1. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan secara keseluruhan telah mencapai keberhasilan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan hingga tercapai sebesar 15,74 persen pada tahun 2014.

Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Tahun 2015
(Erna Haryanti Koestedjo)

2. Keberhasilan Grindulu Mapan ditunjukkan dengan menurunnya jumlah RTSM pada tahun 2011 sebesar 6.936 RT menjadi 2.092 RT. Terjadi penurunan jumlah RTSM sebanyak 69,84 %.
3. Pelaksanaan program Grindulu Mapan sebagai inisiatif dan inovasi pemerintah daerah dinilai semakin baik dengan diperluasnya rumahtangga sasaran dari RTSM menjadi RTSM, RTM dan RTHM.
4. Tujuan program Grindulu Mapan untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi dan pemenuhan layanan dasar telah tercapai. Sedangkan tujuan keberdayaan RT miskin masih harus ditingkatkan lagi.
5. Dari analisis Nilai Tambah Ekonomi bantuan, program paling efektif adalah dengan memberikan bantuan modal usaha produktif, dengan pengawasan dan pengendalian yang baik.
6. Partisipasi dan kontribusi pihak swasta (perusahaan) dan LSM masih rendah dan perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

REKOMENDASI

1. Program Grindulu Mapan membutuhkan indikator outcome dan manfaat yang dapat menjabarkan pencapaian secara kuantitatif, khususnya dalam mengukur tujuan peningkatan ketahanan sosial ekonomi rumahtangga sasaran.
2. Dibutuhkan sosialisasi lebih intensif tentang program ini kepada masyarakat luas sehingga dapat diharapkan adanya partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.
3. Pemberdayaan masyarakat miskin diharapkan dapat dilaksanakan dalam konsep pemberdayaan berbasis komunitas, sehingga rumahtangga sasaran tidak berjuang sendirian dan selalu mendapatkan pendampingan dari komunitasnya.
4. Fokus bantuan bagi rumahtangga produktif disarankan pada kelompok rumah tangga miskin. Karena 52,55 persen RTM masih membutuhkan bantuan agar menjadi RT yang mampu dengan pendapatan diatas garis kemiskinan. Diharapkan kelompok ini dapat segera berubah dan terlepas dari kemiskinan dan menarik perhatian bagi kelompok Rumahtangga Miskin (RTM) dan Rumahtangga Sangat Miskin (RTSM) yang masih produktif.
5. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat sistem informasi tentang berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan melalui SKPD terkait. Sistem informasi melalui media online dan cetak yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat luas untuk membantu masyarakat miskin.
6. Program penanggulangan kemiskinan Grindulu Mapan yang telah menunjukkan keberhasilannya patut dilanjutkan lagi pada masa mendatang dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, selain menggunakan anggaran dari pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur maupun anggaran dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

-----, 2014. Perkembangan Pembangunan Jawa Timur 2014. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Tahun 2015
(Erna Haryanti Koestedjo)

- , 2014. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2013. Grindulu Mapan (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan). Sekreatariat Program Grindulu Mapan. Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pacitan.
- , 2013. Pedoman Umum Tahun 2013 – Grindulu Mapan. Posdaya sebagai Ujung Tombak. Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pacitan.
- , 2014. Laporan Pendampingan Program Grindulu Mapan Tahun 2014. Kerjasama YKMI dengan Bappeda Kabupaten Pacitan. Pacitan.
- , 2014. Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Implementasi Program Kabupaten Sehat Di Kabupaten Pacitan. Presentasi Bappeda Kabupaten Pacitan pada Acara Kunjungan Bappeda Kabupaten Mamasa. Pacitan.
- , 2011. Laporan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan 2003-2010. Bapemas Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- , 2011. Profil Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) Bappenas. Jakarta.
- Adhistya Cinta DI. 2014. Analisis Biaya Manfaat Proyek Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Mohammad Muktiali. 2009. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi manfaat program pembangunan di Kota Semarang. Jurnal Riptek Vol. 3. Nomor 2. Tahun 2009. Hal. 11-20. Universitas Diponegoro. Semarang.
- TNP2K. 2012. Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan. Buku Pegangan TKPK Daerah. Jakarta.
- Andrew D. Steer. 2006. Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Ringkasan Laporan Bank Dunia. Jakarta